

YK

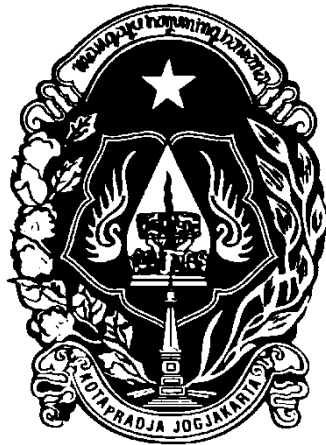


PERUBAHAN RENJA

KEMANTREN KRATON

2023





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
2023**

**KEMANTREN KRATON
KOTA YOGYAKARTA
2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud Dan Tujuan	I-3
1.4 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	II-1
Tabel 2.1	II-6
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023	III-1
Tabel 3.1	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kemantren Kraton disusun melalui evaluasi program kegiatan sampai dengan semester satu Tahun 2021 untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja OPD ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Perubahan Renja Kemantren Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2023 didasarkan pada peraturan yang mengkait, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta;
14. Perwal No 69 Tahun 2021 ttg Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
15. Perwal No 70 Tahun 2021 ttg Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kemantren Kraton Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tribulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:

- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.
- Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan
Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2.1

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun
2023

Tabel 3.1

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pada Bulan April 2023 Kemantren Kraton melakukan review Renstra Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton yang pelaksanaannya dengan Evaluasi Kelurahan yang merupakan indikator sasaran OPD Tahun 2023 direview sesuai dengan realisasi Tahun 2022 yaitu sebesar 385

Kemudian untuk Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton tidak direview nilai BB

Realisasi program indikator Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 85,44 masih dibawah target Tahun 2023 sehingga target Tahun 2023 (target 85,50) tidak direview.

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2022 sudah melebihi target tahun 2023 sehingga target direview dari Rp. 748.539.000,- menjadi Rp. 1.024.570.000,-

Target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2023 direview sesuai dengan realisasi Tahun 2022 yaitu 36 pelanggaran jadi ada penurunan target yang semula 85 menjadi 36.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai sampai dengan Triwulan II.

Evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategik sampai dengan Triwulan II. Dengan melakukan evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II diharapkan pada Triwulan berikutnya dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara

kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan II merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II dan dapat merencanakan perubahan anggaran yang dibutuhkan Kemantren Kraton pada Tahun 2023 ini dengan tepat.

Untuk mengukur kinerja Kemantren Kraton Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantren Kraton adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton dengan indikator hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat.

Kemudian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kedua adalah Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Hasil Capaian Kinerja dari Indikator Kinerja Utama dari Tahun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 sesuai dengan review Renstra dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN KRATON TAHUN 2017-2022**

No.	Sasaran OPD	Target						Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	346,67	364,67	251,33	362,33	353	350,67	364,67	380

**DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMANTREN KRATON TAHUN 2023-2026**

No.	Sasaran OPD	Target				Realisasi
		2023	2024	2025	2026	2023
1	Nilai Penilaian mandiri Revormasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB	-
2	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	300	306	320	341,67	385,55

Berikut data indikator Program beserta reviewnya yang telah dilaksanakan Kemantren Kraton :

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Sasaran : Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton
 Indikator : Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	66,90	70,00	70,10	70,20	BB	BB	BB	BB
Realisasasi					70,52			

Sasaran : Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat

Indikator : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	365	375	385	395	385	390	395	400
Realisasasi					385,55			

2. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	85,50	85,75	86,00	86,25	85,50	85,75	86,00	86,25
Realisasasi					85,44			

3. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	748.539.000	750.915.000	779.615.000	781.706.000	1.024.570.000	1.032.431.000	1.039.635.000	1.045.135.000
Realisasasi					307.353.000 (TW 1)			

4. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	85	80	75	70	36	36	36	36
Realisasasi					7 (TW 1)			

5. Tingkat Realisasi Program

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator : Prosentase Permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi

Uraian	2023	2024	2025	2026	Review			
					2023	2024	2025	2026
Target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Realisasasi					100 %			

6. Keterangan:

- Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi yaitu Hasil Penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat Tahun 2023 direview dari angka menjadi huruf, yang semula 66,90 menjadi BB
- Indikator sasaran Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton yang pelaksanaannya dengan Evaluasi Kelurahan yang merupakan indikator sasaran OPD Tahun 2023 direview karena realisasi Tahun 2022 sudah melbihi target tahun 2023, target semula 365 menjadi 385
- Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 masih diatas realisasi tahun 2022 sehingga target tidak dinaikan.
- Untuk Indikator sasaran Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton direview karena realisasi tahun 2022 sudah diatas target 2023, dari target semula 748.539.000 Rupiah menjadi 1.024.570.000 rupiah.
- Target indikator Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda Tahun Tahun 2023 direview sesuai dengan realisasi Tahun 2022 yaitu 36 pelanggaran, jadi ada penurunan target dari 85 menjadi 36 pelanggaran.
- Target indikator Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yaitu Prosentase Permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi masih tetap 100%.

Pada Tahun 2023 Kemantren Kraton telah merencanakan dan melaksanakan 6 program Kegiatan yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun kesimpulan realisasi pelaksanaan fisik dan keuangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sampai Triwulan II atau Bulan Juni baru terlaksana koordinasi persiapan pelaksanaan Dana Keistimewaan yang berupa pelaksanaan Pentas Seni di Hari Keistimewaan sebesar Rp. 4.640.000,- atau sebesar 100% dari target sampai dengan Bulan Juni 2023.
- Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota terealisasi sebesar Rp. 3.016.065.424,- atau sebesar 60,88% dari target sampai dengan Bulan Juni dikarena ada beberapa belanja yang baru dalam proses e catalog seperti meja rapat dan kursi tunggu, serta belanja pemeliharaan gedung kantor dalam proses pencairan, dan belanja internal Kemantren dan Kelurahan seperti belanja listrik, air, telepon, pemeliharaan kendaraan, piket linmas untuk kantor Kemantren dan Kelurahan terealisasi sesuai dengan kebutuhan, untuk pemeliharaan suku cadang kendaraan dalam proses pelaksanaan dan akan di pertanggung jawabkan di Bulan Juli.
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terealisasi sudah terlaksana sebesar 99,41% dari target Bulan Juni, dengan terlaksananya Sosialisasi Adminduk dan Peizinan IMB dan Reklame serta pelayanan Paten.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tercapai 92,42 % dari target sampai dengan Juni dikarenakan ada beberapa fasilitasi di Kelurahan Patehan seperti fasilitasi karawitan, fasilitasi tari klasik dan fasilitasi RKB yang akan dihapus di perubahan dikarenakan minimnya peserta serta keua RKB sehingga kegiatan menjadi fakum. Kemudian untuk pengadaan CCTV di Kelurahan Patehan belum bisa dilaksanakan dikarenakan Rekomendasi dari Kominfo belum turun.
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tercapai 42,31% dari target sampai dengan Juni dikarenakan pelaksanaan PAM tidak bisa terealisasi sepenuhnya dikarenakan belum adanya kegiatan-kegiatan sosial yang membutuhkan pengamanan, serta PAM gerebek syawal jatuh pada akhir bulan Juni sehingga pertanggungjawaban masuk di Bulan Juli.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tercapai 100% sesuai dengan target di Bulan Juni dengan terlaksananya koordinasi Forkompimka, FKUB, FPK dan FKDM sebagai forum pemecahan permasalahan di wilayah kemantren dan kelurahan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN KRATON
TAHUN 2023

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	365 poin
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	66.90 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formu la Indikat or Progra m	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKP D Pen angg ung Jaw ab	Ket
					Fisik	Keu angan	Fisi k	Ke ua ngan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realiasi TW II Tahun 2023		F i s i k	Keu ang an	Fis ik	Keua ngan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni (%)		100,0 0%	0	0,00 -	0	100,00 %	100.000.000, 00	6 % %	4.640.000,00	6% %	4.640.000,00	6%	100,00 %					Mantri Pamong Praja	
		AdatSeniTradisi dan Lembaga Budaya								100.000.000, 00		4.640.000,00		4.640.000,00		100%						
		1 Gelar Budaya Jogja				0		0		100.000.000, 00	12,00 %	4.640.000,00	12,00 %	4.640.000,00	100,00%	100,00 %						

			SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00 %		100,00 %		0,00 %							
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0	0		720.000,00	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %						
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00 %		0,00 %		0,00 %							
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0	0		3.550.000,00	45,09 %	1.480.000,00	45,09 %	1.480.000,00	100,00 %	100,00 %						
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan	0 laporan	5 laporan		0,00 %		45,09 %		0,00 %							
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0		690.000,00	52,00 %	345.000,00	52,00 %	345.000,00	100,00 %	100,00 %						
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0 laporan	1 laporan		0,00 %		52,00 %		0,00 %							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4.667.535,50		3.173.153,77		2.374.589,93		74,83						
									0,00		6,00		5,00		%						
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0	0		4.660.335,50	70,00 %	3.170.268,77	70,00 %	2.371.704,93	100,00 %	74,81 %						
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 bulan	0 bulan	12 bulan		0,00 %		70,00 %		0,00 %							

		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	0		160.000,00	52,00 %	80.000,00	52,00 %	80.000,00	100,00%	100,00 %					
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen		12 dokumen		0,00 %		52,00 %		0,00%						
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0	0		1.680.000,00	52,00 %	840.000,00	52,00 %	840.000,00	100,00%	100,00 %					
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0 dokumen		4 dokumen		0,00 %		52,00 %		0,00%						
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0	0		700.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan	0 laporan		1 laporan		0,00 %		0,00%		0,00%						
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0	0		385.000,00	0,00 %	0	0,00%	0	0,00%	0,00%					
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		0,00%		0,00%						
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0	0		3.930.000,00	43,00 %	1.620.000,00	43,00 %	1.620.000,00	100,00%	100,00 %					
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0 laporan		12 laporan		0,00 %		43,00 %		0,00%						

		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0	0		345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		100,00%		0,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									4.117.000,00		943.000,00		594.000,00		62,99%						
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0	0		1.035.000,00	35,00%	345.000,00	35,00%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		35,00%		0,00%							
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			0	0		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	99,64%						
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		100,00%		0,00%							
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0	0		644.000,00	52,00%	322.000,00	52,00%	319.000,00	100,00%	99,07%						
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0 laporan	2 laporan			0,00%		52,00%		0,00%							
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0		1.610.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00%		0,00%		0,00%							
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0		276.000,00	20,00%	0	20,00%	0	100,00%	0,00%						
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00%		20,00%		0,00%							
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0	0		276.000,00	20,00%	0	20,00%	0	100,00%	0,00%						

			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		20,00 %		0,00 %							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1.380.000,00		690.000,00		690.000,00		100 %						
	21	MonitoringEvaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0		0			1.380.000,00	55,00 %	690.000,00	55,00 %	690.000,00	100,00 %	100,00 %						
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00 %		55,00 %		0,00 %							
Administrasi Umum Perangkat Daerah										168.158.324,00		105.369.567,00		87.825.292,00		83,35 %						
	22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0		0			16.090.500,00	73,00 %	11.367.975,00	73,00 %	10.210.500,00	100,00 %	89,82 %						
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00 %		73,00 %		0,00 %							
	23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0		0			68.369.774,00	75,66 %	50.267.728,00	75,66 %	41.005.772,00	100,00 %	81,57 %						
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00 %		75,66 %		0,00 %							
	24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0		0			5.561.450,00	75,00 %	4.075.266,00	75,00 %	2.996.720,00	100,00 %	73,53 %						
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00 %		75,00 %		0,00 %							
	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0		0			25.368.600,00	58,00 %	14.158.598,00	58,00 %	10.711.300,00	100,00 %	75,65 %						
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		12 paket		0,00 %		58,00 %		0,00 %							
	26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			0		0			200.000,00	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %						
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00 %		0,00 %		0,00 %							

	27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0	0		52.568.000,00	51,00 %	25.500.000,00	51,00 %	22.901.000,00	100,00%	89,81 %					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00 %		51,00 %		0,00%						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								394.643.370,00		127.513.370,00		110.630.600,00		86,76 %					
	28	Pengadaan Mebel			0	0		43.267.700,00	100,00 %	43.267.700,00	100,00 %	26.775.000,00	100,00%	61,88 %					
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit	0 unit	48 unit			0,00 %		100,00 %		0,00%						
	29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0	0		270.925.600,00	8,22 %	3.795.600,00	8,22%	3.795.600,00	100,00%	100,00 %					
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	28 unit			0,00 %		8,22%		0,00%						
	30	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0	0		80.450.070,00	99,99 %	80.450.070,00	99,99 %	80.060.000,00	100,00%	99,52 %					
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	30 unit			0,00 %		99,99 %		0,00%						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								584.486.000,00		268.716.000,00		253.248.128,00		94,24 %					
	31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	0		1.300.000,00	100,00 %	1.300.000,00	100,00 %	1.050.000,00	100,00%	80,77 %					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00 %		100,00 %		0,00%						
	32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0	0		104.400.000,00	65,01 %	66.000.000,00	65,01 %	53.816.423,00	100,00%	81,54 %					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	12 laporan			0,00 %		65,01 %		0,00%						
	33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			0	0		478.786.000,00	44,46 %	201.416.000,00	44,02 %	198.381.705,00	99,01%	98,49 %					

		Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan	12 laporan		0,00 %		44,02 %		0,00%								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									292.438.000,00		217.890.998,00		184.712.469,00		84,77 %							
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0		0		98.044.000,00	52,28 %	49.496.998,00	52,28 %	32.629.128,00	100,00%	65,92 %							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit	15 unit		0,00 %		52,28 %		0,00%								
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0		0		19.875.000,00	51,35 %	8.875.000,00	51,35 %	5.315.000,00	100,00%	59,89 %							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit	27 unit		0,00 %		51,35 %		0,00%								
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0		0		174.519.000,00	93,91 %	159.519.000,00	92,67 %	146.768.341,00	98,68%	92,01 %							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit	13 unit		0,00 %		92,67 %		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja														99,92%	77,46 %							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi							
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	86,25 poin	0	85,44 poin	0	85,75 poin	191.476.150,00	85,75 poin	95.371.750,00	85,44 poin	94.804.995,00	99%	99,41 %						
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum									60.874.000,00		22.960.000,00		22.943.245,00		99,93 %							
		1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat		0		0		60.874.000,00	39,81 %	22.960.000,00	39,81 %	22.943.245,00	100,00%	99,93 %							

		Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		0,00 %		39,81 %		0,00 %							
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										130.602.150,00		72.411.750,00		71.861.750,00		99,24 %						
		2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0	0		1 dokumen	26.178.500,00	76,95 %	19.968.500,00	76,95 %	19.968.500,00	100,00 %	100,00 %						
		3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0	0		1 laporan	104.423.650,00	52,22 %	52.443.250,00	52,22 %	51.893.250,00	100,00 %	98,95 %						
Rata-rata capaian kinerja															100,00 %	99,63 %						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Persentase swadaya masyarakat total pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan	781.706.000,00 rupiah	0	1.261.258.000,00 rupiah	0	748.539.000,00 rupiah	3.576.960.705,00	37269500 rupiah	1.309.114.770,00	598701000 rupiah	1.209.854.750,00	159,97 %	92,42 %					Mantri Pamong Praja	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										83.762.500,00		27.282.500,00		20.157.500,00		73,88 %						

		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			0	0		83.762.500,00	39,54%	27.282.500,00	39,54%	20.157.500,00	100,00%	73,88%					
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan	0 laporan	7 laporan			0,00%		39,54%		0,00%						
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							3.310.795.705,00		1.168.028.270,00		1.081.024.750,00		92,55%					
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			0	0		39.111.000,00	100,00%	39.111.000,00	100,00%	38.880.500,00	100,00%	99,41%					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan			0,00%		100,00%		0,00%						
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan			0	0		452.494.820,00	21,96%	57.909.520,00	14,86%	24.416.000,00	67,67%	42,16%					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0 unit	143 unit			0,00%		14,86%		0,00%						
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan			0	0		598.510.000,00	25,91%	105.960.000,00	25,91%	105.660.000,00	100,00%	99,72%					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0 Unit	157 Unit			0,00%		25,91%		0,00%						
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten			0	0		552.165.635,00	25,95%	101.200.000,00	25,95%	100.800.000,00	100,00%	99,60%					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0 unit	108 unit			0,00%		25,95%		0,00%						
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten			0	0		470.436.500,00	51,02%	228.953.500,00	50,74%	189.571.500,00	99,45%	82,80%					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas	0 pokmas/ormas	157 pokmas/ormas			0,00%		50,74%		0,00%						

		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan			0	0		697.496.000,00	54,23 %	356.363.500,00	54,03 %	334.065.500,00	99,63 %	93,74 %					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pok mas/ ormas	0 pok mas/ ormas	206 pokmas /ormas			0,00 %		54,03 %		0,00%						
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan			0	0		495.997.750,00	62,10 %	275.642.750,00	62,00 %	284.784.250,00	99,84 %	103,32 %					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pok mas/ ormas	0 pok mas/ ormas	131 pokmas /ormas			0,00 %		62,00 %		0,00%						
		9	Evaluasi Kelurahan			0	0		4.584.000,00	64,41 %	2.888.000,00	64,41 %	2.847.000,00	100,00 %	98,58 %					
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan	0 laporan	4 laporan			0,00 %		64,41 %		0,00%						
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									87.875.000,00		47.124.000,00		45.996.500,00		97,61 %					
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			0	0		47.816.000,00	53,79 %	23.690.000,00	53,79 %	22.692.500,00	100,00 %	95,79 %					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan			0,00 %		53,79 %		0,00%						
		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			0	0		40.059.000,00	61,79 %	23.434.000,00	61,79 %	23.304.000,00	100,00 %	99,45 %					
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan	0 laporan	1 laporan			0,00 %		61,79 %		0,00%						
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									77.967.500,00		58.400.000,00		54.396.000,00		93,14 %					
		12	Peningkatan Ketahanan Pangan			0	0		13.560.000,00	100,00 %	13.560.000,00	100,00 %	13.495.000,00	100,00 %	99,52 %					

			Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga	0 keluarga	30 keluarga		0,00 %		100,00 %		0,00 %								
		13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			0	0		19.585.000,00	79,72 %	15.470.000,00	79,72 %	15.405.000,00	100,00 %	99,58 %							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga	0 keluarga	50 keluarga		0,00 %		79,72 %		0,00 %								
		14	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			0	0		31.322.500,00	80,65 %	23.745.000,00	80,65 %	20.466.000,00	100,00 %	86,19 %							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 keluarga	0 keluarga	50 keluarga		0,00 %		80,65 %		0,00 %								
		15	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			0	0		13.500.000,00	62,67 %	5.625.000,00	62,67 %	5.030.000,00	100,00 %	89,42 %							
				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 keluarga	0 keluarga	40 keluarga		0,00 %		62,67 %		0,00 %								
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)									16.560.000,00		8.280.000,00		8.280.000,00		100%							
		16	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			0	0		16.560.000,00	52,00 %	8.280.000,00	52,00 %	8.280.000,00	100,00 %	100,00 %							
				Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00 %		52,00 %		0,00 %								
Rata-rata capaian kinerja														97,91 %	91,45 %							

Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	70,00 pelanggaran	0	36,00 pelanggaran	0	85,00 pelanggaran	61.275.500,00	25 pelanggaran	27.880.250,00	13 pelanggaran	20.258.000,00	148%	72,66%					Mantri Pamong Praja	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									61.275.500,00		27.880.250,00		20.258.000,00		72,66%							
	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan	12 laporan	61.275.500,00	49,15%	27.880.250,00	49,15%	20.258.000,00	100,00%	72,66%							
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	72,66%								
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sedang								

	Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kraton) x 100%	100,00 persen	0		0	100,00 persen	32.445.000,00	100 persen	14.288.000,00	100 persen	14.288.000,00	100%	100,00%					Mantri Pamong Praja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah										32.445.000,00		14.288.000,00		14.288.000,00		100%					
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)			0		0		4.275.000,00	69,00%	2.850.000,00	69,00%	2.850.000,00	100,00%	100,00%					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang		0 orang	60 orang			0,00%		69,00%		0,00%						

		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			0		0		28.170.000,00	42,52 %	11.438.000,00	42,52 %	11.438.000,00	100,00 %	100,00 %								
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00 %		42,52 %		0,00 %									
Rata-rata capaian kinerja															100,00 %	100,00 %								
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Total anggaran dari seluruh program										10.085.355,549,00		5.349.366,481,00		4.359.931,169,00										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)															99,33 %	81,50 %								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)															Sangat Tinggi	Tinggi								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Tersedianya SDM yang sehat dan semangat kerja 2. Adanya koordinasi berkelanjutan																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: 1. Adanya ASN yang pensiun dan TT yang mengundurkan diri 2. Rekomendasi Kominfo belum turun untuk pengadaan CCTV Kel Patehan.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																					

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Daerah sebagai tindak lanjut dari rencana kerja nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan:

Adapun Kemantren Kraton memiliki dua tujuan itu :

- 1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton**
- 2. Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu :

Tujuan Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton diukur dengan indikator kinerja Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah BB sedangkan target pada akhir Renstra adalah BB.

Tujuan Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton diukur dengan indikator Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 385 sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 400.

Rumusan Indikator Tujuan

1. Indikator Nilai penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat dilaksanakan berdasarkan Permenpan RB no 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI No. B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Indikator ke dua adalah Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat. Dengan formula Indikator Jumlah nilai perkembangan kelurahan dibagi jumlah kelurahan.

Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur dengan Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan untuk:

- a. Menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakatan

Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
- b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;

- c. Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan
Kelurahan Kurang Berkembang.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton untuk jangka waktu 4 tahun kedepan, Kemantren Kraton menetapkan Sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton
Dengan nilai indikator ssaran Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat
2. Meningkatnya Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
Dengan indikator sasaran Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dan dengan metodologi Nilai Evaluasi perkembangan Kelurahan Patehan ditambah Kelurahan Panembahan ditambah Kelurahan Kadipaten dibagi
- 3.

Program dan Kegiatan

Tema Pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 adalah :
“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat. Selaras dengan tematik Pembangunan Kota Yogyakarta maka pada tahun 2023, Kemantren Kraton melaksanakan Program, kegiatan, sub kegiatan sebagai berikut:

- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**
 - 01 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / verifikasi keuangan SKPD
- 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- 04 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 05 SKPD
- 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 04 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**
- 01 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 05 Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 04 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 06 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 01 Pengadaan Mebel
- 02 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 03 Pengadaan Aset tetap lainnya

- 07 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 02 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
 - 01 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
 - 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**
 - 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**
 - 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 - 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - 2 Evaluasi Kelurahan
 - 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Patehan)
 - 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)
 - 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)
 - 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)
 - 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kadipaten)
 - 4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)

- 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
 - 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - 2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**
 - 1 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- 05 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**
 - 1 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat
 - 2 Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
 - 4 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
 - 01 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
 - 1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
 - 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**
 - 1 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Kraton Tahun 2023 Kemantren Kraton menambah beberapa rincian belanja diantaranya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yaitu dengan

pengadaan meja rapat kemudian di Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya menambah pembelian dispenser dan TV LED 32" , kemudian dalam Pemeliharaan Gedung kantor juga menambah untuk pemeliharaan interior ruang Mantri Pamong Praja, Belanja Modal kanopi dan pemeliharaan talang Kel. Panembahan, pemasangan backdrop ruang rapat Kel. Kadipaten, selanjutnya diusulkan juga penambahan daya listrik untuk kantor Kemantren Kraton karena daya listrik yang ada masih kurang mencukupi yang mengakibatkan MCB sering anjlok, anggaran ini digunakan dalam kegiatan administrasi perkantoran dan mendukung peningkatan kinerja dan percepatan proses pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang diampu oleh Jawatan Sosial ada beberapa penambahan anggaran di rincian sub kegiatan yaitu Pembinaan dan Penyegaran pengadministrasian kegiatan kelompok PKK RT dan RW dikarenakan penganggaran di murni hanya sampai Triwulan 2, pada lomba administrasi PKK tingkat kota dikarenakan pelaksanaan lomba tidak di kemantren sehingga anggaran sewa dihilangkan, selanjutnya ada penambahan anggaran di forum TP PKK Kecamatan Kraton dan forum Pemberdayaan Tingkat Kemantren dikarenakan penganggaran murni hanya sampai dengan TW 2, kemudian pada Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ada pengurangan anggaran di rincian Lomba Masak "Menu Keluarga" Berbasis B2SA, Sosialisasi Penanganan Stunting dikarenakan pengurangan jumlah yang diundang, kemudian ada penambahan anggaran pada monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan PMT stunting dikarenakan pelaksanaan yang tadinya 2 kali menjadi 3 kali. Selanjutnya dalam Sub Kegiatan Nama Sub Keg : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya ada pengurangan pada rician belanja Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan dikarenakan di DPA murni ada kelebihan penganggaran transport.

Masih pada Program Pemberdayaan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan :

- Kel. Patehan ada pengurangan di Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patehan yaitu pada rincian Pelatihan Tari Klasik, fasilitasi karawitan dan fasilitasi RKB dikarenakan kekurangan peserta tari klasik, kesibukan peserta karawitan sehingga tidak bisa dilaksanakan, kemudian untuk fasilitasi RKB dikarenakan ketua RKB sakit dan belum ada pengganti.
- Kel. Panembahan ada penambahan anggaran di Sub. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yaitu penambahan anggaran pengadaan CCTV dikarenakan anggaran di DPA Murni masih kurang jika disesuaikan dengan rekomendasi Kominfo, Kebutuhan Kel Panembahan 32 titik dan anggaran DPA murni hanya cukup untuk 10 titik sehingga masih ada kekurangan 22 titik.
Kemudian di Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ada penambahan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan SDIDTK (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang).
- Kel. Kadipaten pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan juga menambahkan anggaran untuk pengadaan CCTV dikarenakan anggaran di DPA Murni masih kurang jika disesuaikan dengan rekomendasi Kominfo. Kebutuhan Kel Kadipaten 8.paket dan baru teranggarkan 4 paket sehingga di perubahan anggaran menambah 4 paket.
Kemudian di Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kel Kadipaten ada tambahan anggaran untuk Pelatihan Adat berbusana Jawa, Pelatihan MC Bahasa Jawa dan Pelatihan packing barang , pelatihan tersebut adalah usulan warga masyarakat yang rencana di usulkan di Musrenbang tp karena keterbatasan pagu sehingga tidak masuk.

Masih dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang diampu Jawatan Praja ada penambahan anggaran untuk fasilitasi koordinasi persiapan pemilihan kampung.

Selanjutnya di Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Sub Kegiatan Pembinaan Penanganan Covid-19 ditingkat Desa dan Kelurahan yang diampu Jawatan Keamanan ada pengurangan anggaran di karenakan pelaksanaan PPK sudah ditiadakan.

Kemudian di Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kemantren Kraton) ada penambahan anggaran pengamanan pemilu yaitu di pergunakan untuk fasilitasi makan monev dan penindakan Tim dibawah koordinasi Jawatan Keamanan berdasarkan pada pengecekan yang dilakukan oleh Bawaslu (fasilitasi operasi penertiban alat peraga kampanye) dan Peningkatan Kapasitas Linmas untuk Pemilu pada masing-masing kelurahan di Kemantren Kraton.

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton
 Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Su mb er Da na	Cat atan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Progra m	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n	Lok asi Out put Keg iata n	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolak Ukur		Tar get
						Sebel um	Sesud ah	Seb elu m	Sesu dah	Seb elu m	Sesu dah							
	KEMANTREN KRATON																10.706.082.446	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN																	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	

7	0				KECAMATAN									9.985.355.549	10.544.760.549			10.706.082.446			
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									6.123.198.194	6.454.291.194			6.102.858.965			
7	0	0	2,		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									10.440.000	10.440.000			9.300.000			
7	0	0	2,	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2.630.000	2.630.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	2.300.000
7	0	0	2,	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1.065.000	1.065.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	975.000
7	0	0	2,	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1.065.000	1.065.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	975.000

						Kemantren Kraton	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	at Daerah	Kelu rahan									Kema ntren Krato n			
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoralat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukung ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Sem ua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	720.000	720.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoralat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	675.000
7	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoralat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	Dukung ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Sem ua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	720.000	720.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoralat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	675.000

						SKPD															
7	0	0	2,	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	5 Laporan	5 Laporan	100 %	100 %	3.550.000	3.550.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	3.100.000
7	0	0	2,	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	690.000	690.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	600.000
7	0	0	2,		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4.667.535.500	4.906.236.500				4.507.457.000

7	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	29 Oran/bu	29 Oran/bu	100 %	100 %	4.660.335.500	4.899.036.500	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	A Nilai	4.501.027.000
7	01	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	160.000	160.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	A Nilai	160.000
7	01	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	1.680.000	1.680.000	AP BD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	A Nilai	1.500.000
7	01	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Hasil penilaian	Jumlah Laporan	Dukungan	Kota Yogyakarta	A Nilai	A Nilai	1 Lap	1 Lapo	100 %	100 %	700.000	700.000	AP BD	Hasil penila	A Nila	650.000

					Keuangan Akhir Tahun SKPD	n SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	yakarta, Kraton, Semua Kelurahan			oran	ran						ian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	i	
7	01	01	2,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	385.000	385.000	APBD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	340.000
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	anDukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	3.930.000	3.930.000	APBD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	3.480.000

						Inspekt orat untuk Kemant ren Kraton	Barang Milik Daerah SKPD	litas kinerja Perangk at Daerah	on, Sem ua Kelu raha n										Inspe ktorat untuk Kema ntren Krato n		
7	0 1	0 1	2, 03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspekt orat untuk Kemant ren Kraton	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordina si Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukung an ketercap aian akuntabi litas kinerja Perangk at Daerah	Kota Yog yaka rta, Krat on, Sem ua Kelu raha n	A Nilai	A Nilai	2 Lap oran	2 Lapo ran	100 %	100 %	644.000	644.000	AP BD	Hasil penila ian SAKI P oleh Inspe ktorat untuk Kema ntren Krato n	A Nila i	840.000
7	0 1	0 1	2, 03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspekt orat untuk Kemant ren Kraton	Jumlah Laporan Rekonsil iasi dan Penyusu nan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukung an ketercap aian akuntabi litas kinerja Perangk at Daerah	Kota Yog yaka rta, Krat on, Sem ua Kelu raha n	A Nilai	A Nilai	12 Lap oran	12 Lapo ran	100 %	100 %	1.610.000	1.610.000	AP BD	Hasil penila ian SAKI P oleh Inspe ktorat untuk Kema ntren Krato n	A Nila i	1.600.000
7	0 1	0 1	2, 03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspekt	Jumlah Laporan Penataus ahaan Barang Milik	Dukung an ketercap aian akuntabi litas	Kota Yog yaka rta, Krat on,	A Nilai	A Nilai	12 Lap oran	12 Lapo ran	100 %	100 %	276.000	276.000	AP BD	Hasil penila ian SAKI P oleh Inspe	A Nila i	300.000

						orat untuk Kemant ren Kraton	Daerah pada SKPD	kinerja Perangk at Daerah	Sem ua Kelu raha n										ktorat untuk Kema ntren Krato n			
7	0 1	0 1	2, 03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspekt orat untuk Kemant ren Kraton	Jumlah Dokume n Hasil Pemanfa atan Barang Milik Daerah SKPD	Dukung an ketercap aian akuntabi litas kinerja Perangk at Daerah	Kota Yog yaka rta, Krat on, Sem ua Kelu raha n	A Nilai	A Nilai	1 Dok ume n	1 Dok ume n	100 %	100 %	276.000	276.000	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspe ktorat untuk Kema ntren Krato n	A Nilai	300.000
7	0 1	0 1	2, 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										1.380.000	1.380.000					1.400.000	
7	0 1	0 1	2, 05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspekt orat untuk Kemant ren Kraton	Jumlah Dokume n Monitori ng, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukung an ketercap aian akuntabi litas kinerja Perangk at Daerah	Kota Yog yaka rta, Krat on, Sem ua Kelu raha n	A Nilai	A Nilai	2 Dok ume n	2 Dok ume n	100 %	100 %	1.380.000	1.380.000	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspe ktorat untuk Kema ntren Krato n	A Nilai	1.400.000
7	0 1	0 1	2, 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										168.158.324	163.158.324					189.862.788	
7	0 1	0 1	2, 06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspekt	Jumlah Paket Kompon en Instalasi Listrik/P	Dukung an ketercap aian akuntabi litas	Kota Yog yaka rta, Krat on,	A Nilai	A Nilai	12 Pake t	12 Pake t	100 %	100 %	16.090.500	16.090.500	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspe	A Nilai	20.777.750

						orat untuk Kemant ren Kraton	eneranga n Banguna n Kantor yang Disediak an	kinerja Perangk at Daerah	Sem ua Kelu raha n									ktorat untuk Kema ntren Krato n				
7	0 1	0 1	2, 06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukung ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Pake t	12 Pake t	100 %	100 %	68.369.774	68.369.774	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	82.649.988
7	0 1	0 1	2, 06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukung ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	8 Pake t	8 Pake t	100 %	100 %	5.561.450	5.561.450	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	5.878.450
7	0 1	0 1	2, 06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukung ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Pake t	12 Pake t	100 %	100 %	25.368.600	20.368.600	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kema	A Nilai	29.150.600

						Kraton													Kraton				
7	0	0	2,	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%	200.000	200.000	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	200.000
7	0	0	2,	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	52.568.000	52.568.000	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai	51.206.000
7	0	0	2,	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										394.643.370	431.343.370					504.643.370	
7	0	0	2,	07	05	Pengadaan Mebel	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua	A Nilai	A Nilai	48 Unit		100%	100%	43.267.700	58.267.700	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk	A Nilai	43.267.700

						Kemantren Kraton		dan operasional perkantoran	Keluurahan									Kemantren Kraton				
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	28 Unit		100%	100%	270.925.600	284.525.600	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	A Nilai	380.925.600
7	01	01	2,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	A Nilai	A Nilai	80 Unit	80 Unit	100%	100%	80.450.070	88.550.070	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Kraton	A Nilai	80.450.070
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										584.486.000	574.286.000					588.630.807	
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua	A Nilai	A Nilai	12 Laporan	12 Laporan	100%	100%	1.300.000	1.300.000	APBD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk	A Nilai	1.300.000

						Kemantren Kraton		at Daerah	Kelu rahan										Kema ntren Krato n			
7	0	0	2,	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukung an ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Sem ua Kelu rahan	A Nilai	A Nilai	12 Lap oran	12 Lapo ran	100 %	100 %	104.400.000	94.200.000	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kema ntren Krato n	A Nila i	104.400.000
7	0	0	2,	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukung an ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Sem ua Kelu rahan	A Nilai	A Nilai	12 Lap oran	12 Lapo ran	100 %	100 %	478.786.000	478.786.000	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kema ntren Krato n	A Nila i	482.930.807
7	0	0	2,		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										292.438.000	363.330.000					297.025.000	
7	0	0	2,	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Dukung an ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Sem ua Kelu rahan	A Nilai	A Nilai	14 Unit	14 Unit	100 %	100 %	98.044.000	98.044.000	AP BD		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kema ntren	A Nila i	79.650.000

7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85,50 poin	85,50 poin	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	60.874.000	60.874.000	AP BD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	85,50 poin	134.960.419
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										130.602.150	128.394.150			127.952.646		
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	85,50 poin	85,50 poin	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	26.178.500	23.970.500	AP BD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	85,50 poin	29.110.000
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Kraton,	85,50 poin	85,50 poin	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	104.423.650	104.423.650	AP BD	Nilai Survey Kepuasan Masy	85,50 poin	98.842.646

							Kemant ren Kraton	pada Urusan Pemerint ahan	kinerja Perangk at Daerah	Sem ua Kelu raha n									arakat Kema ntren Krato n							
7	0	0					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														309.860.000	308.003.000				410.427.000
7	0	0	2,				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa														83.762.500	86.131.500				108.190.000
7	0	0	2,	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Angka Swaday a Masyar akat Total Kemant ren Kraton	Jumlah Laporan Peningka tan Efektivit as Kegiatan Pemberd ayaan Masyara kat di Wilayah Kecamat an	Terlaksa nanya koordin asi pemberd ayaan masyara kat	Kota Yog yaka rta, Krat on, Sem ua Kelu raha n	748.5 39.00 0	1.024. 570.0 00	7 lapo ran	7 lapor an	100 %	100 %	83.762.500	86.131.500	AP BD		Angk a Swad aya Masy arakat Total Kema ntren Krato n	104. 040. 000	Rupiah 108,190,000				
7	0	0	2,				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														43.695.000	43.695.000				43.853.000

7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	n100%	n100%	39.111.000	39.111.000	APBD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 39,188,000
7	01	03	2,02	04	Evaluasi Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000		4 laporan	4 laporan	100%	100%	4.584.000	4.584.000	APBD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 4,665,000
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											87.875.000	92.343.000			108.242.000	
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	30 Lembaga Kemasyarakatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	47.816.000	52.284.000	APBD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 61,742,000

7	01303	02,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat kecamatan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	1 laporan	1 laporan	100%	100%	40.059.000	40.059.000	APBD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 46,500,000
7	01305	02,05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)											16.560.000	8.280.000			17.600.000	
7	01305	02,05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya pembinaan penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000		1 laporan	1 laporan	100%	100%	16.560.000	8.280.000	APBD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 17,600,000
7	01306	02,06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan											77.967.500	77.553.500			132.542.000	
7	01306	02,06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	30 Keluarga	30 Keluarga	100%	100%	13.560.000	13.560.000	APBD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 14,175,000

7	0	0	2,	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	50 Keluarga	50 Keluarga	100 %	100 %	31.322.500	31.503.500	AP BD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 31,322,500
7	0	0	2,	08	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf	Terlaksananya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	748.539.000	1.024.570.000	40 Keluarga	40 Keluarga	100 %	100 %	13.500.000	12.905.000	AP BD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 14,100,000

						Kraton	un												ntren Kraton			
7	0	0	2,	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Patehan)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	748.539.000	1.024.570.000	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	100%	100%	495.997.750	491.712.750	APBD		Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 540,142,966
TOTAL																948.492.570	944.207.570			1.135.982.486		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program			Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur			Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN																	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
7	01	03	2,	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	
7	01	03	2,	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Panembahan)	Angka Swadaya Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kegiatan Pember	Kota Yogyakarta, Kraton	748.539.000	1.024.570.000	154 unit	154 unit	100%	100%	598.510.000	698.510.000	APBD		Angka Swadaya Masy	104.040.000	Rupiah 837,013,002

						Total Kemant ren Kraton	Keluraha n yang Terbang un	dayaan Kelurah an	on, Pane mba han									arakat Total Kema ntren Krato n									
7	0	0	2,	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Panembahan)	Angka Swadaya Masyar akat Total Kemant ren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksa nakan Pemberd ayaan Masyara kat di Keluraha n	Terlaksa nanya Kegiata n Pember dayaan Kelurah an	Kota Yog yaka rta, Krat on, Pane mba han	748.5 39.00	1.024. 570.0 00	30 P okm as / Orm as	30 P okm as / Orm as	100 %	100 %	697.496.000	700.246.000	AP BD		Angk a Swad aya Masy arakat Total Kema ntren Krato n	104. 040. 000	Rupiah 679,729,172					
TOTAL																1.296.006.000	1.396.006.000				1.516.742.174						
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluara n Sub Kegiata n	Hasil Kegiata n	Lok asi Out put Kegi ata n	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif (Rp.)	Su mber Da na	Cat atan Pent ing	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
										Progr am			Kelu aran Sub Kegi atan					Hasil Kegi atan	Tolak Ukur		Tar get						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																						
7	0	1			KECAMATAN																	1.022.602.135	1.139.652.135				1.183.278.256
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	1.022.602.135	1.139.652.135				1.183.278.256
7	0	0	2,		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																	1.022.602.135	1.139.652.135				1.183.278.256
7	0	0	2,	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Angka Swadaya	Jumlah Sarana dan	Terlaksa nanya Kegiata	Kota Yog yaka	748.5 39.00	1.024. 570.0	60 Unit	60 U nit	100 %	100 %	552.165.635	670.365.635	AP BD		Angk a Swad	104. 040.	Rupiah 616,898,156					

					(Kadipaten)	Masyarakat Total Kemantren Kraton	Prasarana Kelurahan yang Terbangun	n Pemberdayaan Kelurahan	rta, Kraton, Kadipaten	00								aya Masyarakat Total Kemantren Kraton	000		
7	01302	03			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kadipaten)	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	748.539.000	1.024.570.000	30 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	100%	100%	470.436.500	469.286.500	APBD	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	104.040.000	Rupiah 566,380,100
TOTAL																1.022.602.135	1.139.652.135			1.183.278.256	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II 2023 ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi ada kalanya masih ada yang kekurangan anggaran dikarenakan keadaan yang tak terduga atau kebutuhan mendadak.
2. Untuk perencanaan penambahan kegiatan di Perubahan anggaran harus mempertimbangkan pelaksanaan fisik di Tahun 2023 sebagian besar sudah terploting di TW 4 sehingga harus mempertimbangkan padatnya pekerjaan di TW 4.
3. Belanja barang harus menggunakan e katalog, sehingga harus jauh-jauh hari dipersiapkan.
4. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan harus melibatkan semua jawatan dan juga kelurahan di Kemantren Kraton
5. Penggunaan anggaran harus didasarkan pada DPA SKPD dan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang ditargetkan.
6. Para PPTK harus selalu memantau sampai dimana pencapaian kegiatan yang dalam kewenangannya.
7. Kegiatan non fisik di tiga kelurahan seperti pelatihan-pelatihan harus dipertimbangkan manfaat kedepannya bagi warga masyarakat dan diutamakan untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Virus Corona.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) OPD Kemantren Kraton Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Kraton Tahun 2023.

Yogyakarta,
Mantri Pamong Praja Kraton



Drs. Sumargandi, M.Si
NIP. 196903121989031005